

Pengelolaan Ekowisata; Konsep dan Kebijakan yang Berkembang

Telly H.I. Kondo

(Politeknik Negeri Manado)

Abstract

Tourism Activity is one of the largest industry in the world. Developing activities involve many parties which completed and benefits to each other. even recognized there was a shift function and the debate over the definition paradigma but efforts remain empowered because Indonesia has the potential for ecotourism. Concepts and policies adopted to express understanding, so that the management of natural resources and tourism actors fully realize the benefits and functions of what ecotourism really is.



dok lestari

Kata kunci: ekowisata, konsep dan kebijakan

Pendahuluan

Pergeseran nilai dan fungsi pariwisata yang kadang tidak terkontrol dan terkendali memotivasi untuk membuat konsep dan kebijakan pembangunan pariwisata yang baru. Artinya kegiatan pariwisata yang tadinya mengutamakan manfaat ekonomi, kini berkembang jauh terkait tentang perlindungan terhadap

semua potensi termasuk sumber daya alam dan lingkungan, pelengkap paket pariwisata meliputi: akomodasi, transportasi, budaya dan sejarah bahkan kepada perilaku calon wisatawan.

Ekowisata dengan berbagai definisi yang dikemukakan pada akhirnya memiliki karakteristik dan spesifikasi sendiri yaitu menyangkut kepedulian terhadap pelestari

rian lingkungan dan pemberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Sehingga prinsip-prinsip kegiatan pengelolaan ekowisata meliputi : (1) berbasis pada alam, (2) menekankan pada kegiatan konservasi, (3) mengacu pada pembangunan pariwisata berkelanjutan, (4) berkaitan dengan pembangunan pendidikan, (5) mengakomodasi budaya lokal dan (6) memberi manfaat pada ekonomi lokal.

Harus diakui perkembangan pada sektor pariwisata seringkali menimbulkan kritik dan kontroversi, sehingga muncul pula paradigma tentang persepsi dari perkembangan pariwisata itu sendiri. Hal ini memotivasi dan menuntun dalam membuat konsep dan kebijakan untuk lebih jauh harus memperhatikan aspek-aspek penting yaitu : aspek ekologi, ekonomis, dan sosial budaya. Ini kemudian disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah masing-masing yang pada akhirnya harus memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD) dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Definisi Dan Konsep Ekowisata

Pengembangan pariwisata terlihat pada pemenuhan dua syarat utama yaitu : (1) memperhatikan kelestarian lingkungan dan (2) orientasi pada masyarakat lokal. Sehingga pariwisata berkelanjutan harus mencakup aspek ekonomi, ekologis, dan sosio kultural. Bahkan kegiatan pariwisata kembali pada "back to nature" dan melakukan konservasi lingkungan.

Kronologis berpikir dengan menghasilkan konsep ekowisata dilatarbelakangi demikian bahkan dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan organisasi dunia lewat kajian dan

analisis yang dalam. Definisi dan konsep itu lahir ternyata memiliki berbagai kesamaan lewat power point penting untuk pembangunan berkelanjutan lewat syarat-syarat yang harus dimiliki yaitu :

- 1). Secara ekologis berkelanjutan, yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata.
- 2). Secara sosial dapat diterima, yaitu mengacu pada kemampuan penduduk lokal untuk menyerap usaha pariwisata (industri dan wisatawan) tanpa menimbulkan konflik sosial.
- 3). Secara kebudayaan dapat diterima, yaitu masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan turis yang cukup berbeda (*tourist culture*)
- 4). Secara ekonomis menguntungkan, yaitu keuntungan yang dapat didapat dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari syarat-syarat diatas akhirnya terjadi beberapa kategori jenis wisata yang berkembang, yang selanjutnya disebut ekowisata. Adapun jenis-jenis wisata tersebut meliputi: bisnis travel, wisata pantai, wisata pedesaan, wisata alam, dan wisata budaya.

Namun demikian hingga saat ini pengertian ekowisata masih diperdebatkan paling tidak dari 15 definisi yang ada yang dikemukakan oleh Fennel (1999), Fennel dan Eagles (1990), *The International Ecotourism Society* (1991) dan *World Convention Union* (1996) dan setelah tahun 1999 muncul seperti Wood (2002).

Fennel (1999) mendefinisikan

ekowisata sebagai wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam. Fennel dan Eagles (1990) sebelumnya mendefinisikan ekowisata merupakan wisata alam yang berfokus di daerah konservasi dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat lokal, konservasi dan pendidikan. *The International Ecotourism Society (TIES)* (1991), mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan bertanggungjawab untuk menik-mati keindahan alam yang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Permasalahan Dalam Pengembangan Ekowisata

Potensi ekowisata baik darat maupun kawasan pesisir dan pulau-pulau belum dimanfaatkan secara optimal. Secara bersamaan kegiatan ekowisata di Indonesia belum berkembang walaupun merupakan salah satu sektor potensial sebagai sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Permasalahan yang muncul dalam usaha pengembangan ekowisata di Indonesia dari berbagai sumber adalah : (1) belum ada konsep yang sama tentang ekowisata oleh para stakeholders, (2) ekowisata masih dijadikan sebagai alat untuk promosi pariwisata, namun implemntasi dari prinsip-prinsip ekowisata masih kurang, (3) perhatian pemerintah untuk pengembangan ekowisata masih kurang, (4) kebijakan yang mendukung masih tumpang tindih, (5) terbatasnya akses yang diperlukan dalam pengelolaan ekowisata (informasi jaringan pasar dan infrastruktur), (6) terbatasnya peran serta masyarakat dan stakeholders

dalam pengembangan ekowisata, (7) meningkatnya degradasi SDA dan lingkungan karena kegiatan wisata (8) kegiatan wisata di lokasi konservasi mendorong tidak terkontrolnya kegiatan pembangunan, dan (9) pemandu yang memiliki keterbatasan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan pelestarian lingkungan ekowisata (Hartoto, tt, 1995).

Konsep ekowisata yang belum disepakati memicu kurangnya komitmen dalam melaksanakan kegiatan ekowisata dan hal ini berdampak negatif pada pengguna lingkungan dan pelaku pengelola wisata dan pelaku wisata. Masalah lain dipicu adanya kebijakan dan peraturan pemerintah yang dikeluarkan tumpang tindih antar departemen terkait.

Membangun Ekowisata

Dengan dilatar belakangi terjadinya pergeseran nilai dan fungsi pariwisata, terjadinya perdebatan tentang definidi ekowisata serta tidak konsistennya pemerintah dalam aturan yang dikeluarkan bahkan perilaku pengelola dan pengguna potensi ekowisata, mendorong kesepakatan untuk melahirkan pemahaman yang sama tentang ekowisata sedunia (*The World Ecotourism Summit*) yang dise-lenggarakan di Kanada tanggal 19-22 Mei 2002.

Indonesia sebagai negara potensial ekowisata merespon positif dengan mencanangkan tahun 2002 sebagai tahun ekowisata di Indonesia. Tema yang diambil berfokus pada daerah pegunungan di daerah gunung berapi (Pidato Menpora, 2002).

Pada dasarnya penetapan pengelolaan suatu lokasi ekowisata harus melibatkan empat kementerian yaitu Menteri Negara

Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya. Keterlibatan empat Menteri ini akhirnya melahirkan aturan dan kebijakan di masing-masing bidang yang saling melengkapi dan memberi manfaat. Selanjutnya diikuti adanya aturan otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah mengikuti perkembangan sesuai porsi daerah bersangkutan.

Namun demikian usaha terus diupayakan dalam pengembangan ekowisata di Indonesia paling tidak mengakomodir kepentingan masyarakat lokal dengan mempertimbangkan tentang lingkungan sekitar supaya tetap eksis soal kekayaannya guna pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan Ekowisata di Indonesia

Dilihat dari berbagai aspek Indonesia sangat baik dan potensial sekali dalam pengembangan ekowisata. Dari segi wilayah dan dari aspek budaya, sejarah dan sumber daya alam dan lingkungannya. Aspek-aspek tersebut unsur-unsur dasar dari ekowisata.

Hal ini juga didukung dengan pemberlakuan UU No.22 dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa usaha pengembangan daerah menjadi tanggungjawab daerah tersebut sehingga secara otomatis pemberdayaan potensi baik dari segi ekonomi, budaya dan sumberdaya alam secara maksimal harus dikelola untuk diberdayakan lewat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, sesuai kondisi dan karakteristik setiap daerah

Potensi Objek Wisata dan Kebijakan Pengelolaan yang Berkelanjutan

Pengelolaan ekowisata terdiri dari 3 bagian yang disatukan secara bersama dalam proses pelaksanaan yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang sifatnya terpadu.

Idealnya ekowisata di era otonomi memberikan peran pada masing-masing tingkat baik pusat, daerah dan tingkat grass root. Hal ini memberi kesempatan supaya pada daerah masing-masing masyarakat harus tanggap dan proaktif mengembangkan potensi yang ada. Kunci faktor pengembangan ekowisata terletak pada faktor internal, eksternal dan structural. Sehingga lewat konsep ekowisata yang berkelanjutan, pemerintah dapat berusaha mengembangkan pendapatan asli daerah memberi berbagai kesempatan kepada masyarakat sambil bersama menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Fennel David.A. 1999. *Ecotourism: An Introduction* Routledge, London and New York.
- Hartoto, D.I et.al., 2003. *Ekowisata: Pembelajaran Dari Kalimantan Timur*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.
- Linberg. K, 1991. *Policies for Maximising Nature Tourism's Ecological and Economic Benefits*. World Resources Institute. Washington DC.
- WOOD. M.E., 2002. *Principles, Practices & Policies for Sustainability*, UNEP.
- WTO (World Tourism Organization), 2002. *Sustainable*

LESTARI

ISSN 1978-452X



9 771978 452009